



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 131 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2022-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menjaga pergerakan inflasi daerah pada tahun 2022 sampai dengan 2024 agar tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil, perlu menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program/kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di daerah;
 - b. bahwa Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dengan berpedoman pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional Periode 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 500/5713/Bangda Hal Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah, Periode Tahun 2022-2024, Tanggal 13 Desember 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024.
- KEDUA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 MARET 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 



R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Dirjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Pimpinan KPw Bank Indonesia Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 131 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 23 MARET 2022**TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2024**

4K	PROGRAM STRATEGI	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga Pasar Komoditas Hortikultura	Pembelian Produk Hortikultura Petani	Minimal 1 kali/tahun			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu	Pelaksanaan operasi pasar saat terjadi gejolak harga			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan , Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Provinsi NTT, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan, Bulog Provinsi NTT

		Pasar Murah dan Bazar	Min 2x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 2x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 2x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembnagunan, Dinas Peindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Provinsi NTT, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan, Bulog Provinsi NTT
		Sidak pasar, monitoring pasokan dan harga, serta gudang distributor	Min 2x Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 2x Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 2x Kegiatan Sidak Pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Peindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Provinsi NTT, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan, Bulog Provinsi NTT

		Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan	Setiap hari melakukan pemantauan harga di pasar dan melaporkan ke Satgas pangan pusat dan pada pelaksanaan HLM di daerah.			Dirkrimsus Polda NTT
	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Program Tanam Jagung Panen Ternak (TJPT)	60.000	100.000	100.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
KETERSEDIAAN PASOKAN	Peningkatan Produksi Domestik	Peningkatan Produksi Bawang Merah dan Cabe Merah	5-10% /Tahun			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Pengembangan Bawang merah di Wilayah Destinasi Wisata	5 Ha/	10 Ha/	10 Ha/	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Pengembangan Bawang Merah	60 Ha/	100 Ha/	100 Ha/	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Pengembangan Aneka Cabai	50 Ha/	100 Ha/	100 Ha/	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Produksi Ikan Tangkap	185.000 Ton	195.000 Ton	200.850 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
		Produksi Daging Ayam Ras	34.171,30 Ton	35.176,36 Ton	36.210,99 Ton	Dinas Peternakan Provinsi NTT
		Produksi Daging Sapi	2.574.717,83 Ton	2.610.248,94 Ton	2.646.270,37 Ton	
		Produksi Daging Babi	1.424.311,99 Ton	1.443.967,50 Ton	1.463.894,25 Ton	
		Produksi telur ayam ras	40.039,08 Ton	41.711,95 Ton	43.454,71 Ton	
		Pembangunan Pabrik Pakan Ternak-Penyediaan pakan ternak untuk mendukung stabilisasi produksi daging ayam ras, telur ayam dan daging babi	Terbangun 1 (satu) Pabrik Pakan ternak di Pulau Timor	Terbangun 2 (Dua) Pabrik Pakan ternak di Pulau Timor & Pulau Sumba	Terbangun 3 (Tiga) Pabrik Pakan ternak di Pulau Timor, Pulau Sumba & Pulau Flores	

		penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	1000 rekomendasi	1000 rekomendasi	1000 rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	
		Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui: - Penyempurnaan bisnis model; dan - Penguatan/replikasi pd UMKM binaan	Tersedianya model bisnis 5 UMKM	Tersedianya model bisnis 7 UMKM	Tersedianya model bisnis 10 UMKM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
KETERSEDIAAN PASOKAN	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pengelolaan pembudidayaan ikan:				Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
		-Jumlah Kakap Putih	50.000 ekor	60.000 ekor	60.000 ekor	
		- jumlah kerapu	150.000 ekor	150.000 ekor	150.000 ekor	
		- jumlah ikan bandeng	850.000 ekor	1.000.000 ekor	1.000.000 ekor	
		- jumlah benih ikan air tawar	750.000 benih	1.000.000 benih	1.000.000 benih	
		pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil :				
		- pengadaan cool box	40 unit	50 Unit	55 unit	
		- pengadaan kapal 3 GT	65 Unit	65 Unit	70 unit	
		- Pengadaan perahu ketinting	65 unit	65 Unit	70 unit	

Penguatan dan Pengawasan Cadangan Pangan	Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan	Dilakukan 1 tahun sekali	Dilakukan 1 tahun sekali	Dilakukan 1 tahun sekali	Dinas Peindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Provinsi NTT, Dinas Ketahanan Pangan
	Pembinaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	210 Kelompok	250 Kelompok	250 Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
	Penyusunan Database Ketersediaan Pangan	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dinas Peindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan Provinsi NTT, Dinas Ketahanan Pangan
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah-Beras (CBP)	CBP minimal 13.000 Ton/ Tahun			Bulog Provinsi NTT
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	SKPG/FSVA dilakukan 1 th sekali	SKPG/FSVA dilakukan 1 th sekali	SKPG/FSVA dilakukan 1 th sekali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
	Pola Pangan Harapan (PPH)	69	71	74	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT

		Neraca Pangan Strategis	Minimal 48 kali per tahun	Minimal 48 kali per tahun	Minimal 48 kali per tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
KETERSEDIAAN PASOKAN	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Melakukan Koordinasi dengan para distributor, Bulog untuk dilaksanakan Pasar Murah Bersubsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah pada Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) di Kota Kupang dan Kab. TTS	Melakukan Koordinasi dengan para distributor, Bulog untuk dilaksanakan Pasar Murah Bersubsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah pada Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) di Kota Kupang Kab. TTU & Kab. Belu	Melakukan Koordinasi dengan para distributor, Bulog untuk dilaksanakan Pasar Murah Bersubsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah pada Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) di Kota Kupang, Kab. Malaka & Sumba Timur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi dan Stok Barang dan Harga di 22 Kab/Kota (Prognosa)	Tersedianya Data Informasi dan Stok Barang dan Harga di 22 Kab/Kota (Prognosa)	Tersedianya Data Informasi dan Stok Barang dan Harga di 22 Kab/Kota (Prognosa)	
		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional di Kota Kupang, Kab. Sikka dan Sumba Timur	Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional di 22 Kab/Kota	Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional di 22 Kab/Kota	
KETERSEDIAAN PASOKAN	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Melakukan Pengawasan pada lini 3 dan 4 yakni mulai dari tingkat distributor, pengecer sampai dengan para petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di 11 Kab/Kota yakni : Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Ende, Manggarai, Ngada, Sikka, SBD	Melakukan Pengawasan pada lini 3 dan 4 yakni mulai dari tingkat distributor, pengecer sampai dengan para petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di 22 Kab/Kota	Melakukan Pengawasan pada lini 3 dan 4 yakni mulai dari tingkat distributor, pengecer sampai dengan para petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di 22 Kab/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

KELANCARAN DISTRIBUSI	Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Melakukan 1 MoU/PKS dengan minimal 2 kali transaksi	Melakukan 2 MoU/PKS dengan minimal 3 kali transaksi	Melakukan 3 MoU/PKS dengan minimal 4 kali transaksi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Optimalisasi pemanfaatan Toko Tani Indonesia Center	Dilakukan 2 kali setahun	Dilakukan 2 kali setahun	Dilakukan 2 kali setahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
	Meningkatkan infrastruktur perdagangan	Optimalisasi TTIC sebagai pusat distribusi bahan pangan pokok yang didukung dengan teknologi e- commerce	Dilakukan setiap hari kerja	Dilakukan setiap hari kerja	Dilakukan setiap hari kerja	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
	Memperbaiki pengawasan jalur distribusi produksi	Pemetaan sumber dan ketersediaan pangan masyarakat di Provinsi NTT (Padi dan Jagung)	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: Fasilitasi UMKM pangan binaan dgn e- commerce di level nasional maupun daerah	10%	20%	30%	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
		Peningkatan volume transaksi Pas Tani	10%/Tahun			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT

KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data	Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional: - Data pasokan - Korelasi data harga dengan inflasi	Publikasi	Evaluasi kesinambungan	Evaluasi dan pemanfaatan utk asesmen	KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
	Memperbaiki Kualitas Data	Pembentukan database surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabe dan Bawang Merah)	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dilakukan setahun sekali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT
		Pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan	Pemantauan harga produk pangan hewani di pasar-pasar tradisional dan penyebaran informasi pasar melalui radio			Dinas Peternakan Provinsi NTT
	Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pokok di website	Adanya Data Ketersediaan Stok kebutuhan masyarakat pada 22 Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Tersebarluasnya Informasi tentang Ketersediaan Stok dan informasi harga barang kebutuhan Pokok di wilayah Nusa Tenggara Timur.			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
Koordinasi Pusat dan Daerah	Peningkatan kehandalan TPID a.l. melalui program pembinaan TPID/ capacity building / Sosialisasi : - Tingkat kehandalan TPID IHK - Tingkat kehandalan TPID non IHK	- Minimal 1 kali Capacity Building/ Tahun - Minimal 1 kali Capacity Building/ Tahun			Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT	

		Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota dan TPID Provinsi dengan TPIP dilaksanakan minimal 2x setahun	Rapat Koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota dan TPID Provinsi dengan TPIP dilaksanakan minimal 2x setahun	Rapat Koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota dan TPID Provinsi dengan TPIP dilaksanakan minimal 2x setahun	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
KOMUNIKASI EFEKTIF	Koordinasi Pusat dan Daerah	Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbuan belanja bijak melalui media cetak/elektronik/Medsos	Minimal 2 kali menjelang HBKN	Minimal 2 kali menjelang HBKN	Minimal 2 kali menjelang HBKN	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT & KPw Bank Indonesia Provinsi NTT
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya: DCF terjaga di kisaran sasaran inflasi	3±1%	3±1%	2,5±1%	KPw Bank Indonesia Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT